

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS BAGI PROYEK-PROYEK YANG DIBIYAI DENGAN
KREDIT LUAR NEGERI ATAS DASAR "PRODUCTION SHARING"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
bahwa kredit luar negeri atas dasar "Production Sharing" adalah suatu sumber untuk membiayai proyek-proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang perlu di giatkan dan memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40) tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia;
3. Keputusan Presiden tentang garis-garis besar pimpinan Ekonomi Nasional tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat pada tanggal 18 Mei 1962;
4. Amanat Presiden tentang garis-garis besar pimpinan Ekonomi Nasional tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat pada tanggal 18 Mei 1962;
5. Pasal 10 Instruksi Presiden No. Instr. 2/Ko.T.O.E. tahun 1962 untuk memperkuat Front Ekonomi tahun 1962;
6. Pernyataan Presiden mengenai pinjaman atau kredit atas dasar Production Sharing pada tanggal 3 Agustus 1962;
7. Keputusan Menteri Pertama/Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Kpts-1/OPekon-PLM/1962 tentang Panitia Kredit atas dasar Production Sharing;
8. Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963 (ps 23-e);
9. Amanat Presiden tentang "Ambeg Parama-Arta" 15 Mei 1963;
10. Resolusi M. P. R. S. No. I/Res/MPRS/1963 (ps 10-e);
11. Keputusan Presiden No. 201 tahun 1963 tentang Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar "Production Sharing" :

Mendengar:

1. Menteri Pertama;
2. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi ;
3. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri ;
4. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan;
5. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi ;

6. Menteri Urusan Bank Sentral;
7. Menteri Urusan Anggaran Negara;
8. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
9. Menteri Perindustrian Rakyat;
10. Menteri Pertanian dan Agraria;
11. Ketua Panitia Production Sharing;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang pemberian fasilitas bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar "Production Sharing".

Pasal 1.

Badan-badan yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar nilai lawan H.P.N., H.P.N.tambahan, bea masuk alat-alat, barang-barang dan sebagainya yang diimpor untuk keperluan pembangunan proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar production sharing.

Pasal 2.

Kepada Badan-badan penyelenggara proyek atas dasar Production Sharing dapat diberikan "tax holiday", yaitu pembebasan pembayaran pajak perusahaan selama maksimum 5 tahun, setelah proyek yang bersangkutan memperoleh sesuatu hasil menurut rencana.

Pasal 3.

Proyek-proyek tersebut memperoleh kesempatan untuk mengurangi labanya dengan penyusutan (depreciation) dalam bentuk fiskal atas alat-alat perusahaan setelah masa tax holiday berakhir.

Pasal 4.

- (1) Pembayaran kembali kredit luar negeri atas dasar production sharing diambil dari hasil devisa/produksi dalam nilai devisa yang dihasilkan oleh proyek yang dibangun itu.
- (2) Pembayaran kembali yang dimaksud diatur menurut peraturan devisa yang berlaku pada saat pembayaran itu dilakukan.
- (3) Besarnya bagian dari devisa/produksi dalam nilai devisa yang dipergunakan untuk pembayaran kembali, ditetapkan berdasarkan perhitungan (cost accounting) sesuai dengan macam dan sifat proyek yang bersangkutan.

Pasal 5.

- (1) Apabila keadaan keuangan negara mengizinkan, maka biaya proyek Pemerintah di bebaskan pada Anggaran Belanja Pembangunan. Dalam hal ini harus terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan. Khususnya untuk proyek-proyek Swasta yang dibiayai dengan kredit Luar negeri atas dasar Production Sharing, pengeluaran-pengeluaran rupiah sejauh mungkin didasarkan atas pengerahan funds and forces.
- (2) Untuk membantu Belanja Rupiah buat biaya-biaya lokal guna membangun proyek tersebut dapat diusahakan pengimporan serta penjualan barang-barang konsumsi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh paasaran Indonesia, dimana barang-barang tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian dari pada proyek seluruhnya.

Pasal 6.

Jaminan Bank bagi Perusahaan yang didirikan dengan kredit Luar negeri atas dasar production sharing tidak diberikan secara otomatis oleh Bank Indonesia. Keperluan akan jaminan dimaksud diperiksa setiap kali dengan mengindahkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yang melarang pemberian jaminan bl angko.

Pasal 7.

Karena kredit Luar negeri atas dasar production sharing pada hakekatnya mempunyai prinsip dan pengertian yang sama dengan kredit yang didapat dari Luar negeri, maka perusahaan yang bersangkutan harus sejak semula dimiliki oleh pihak Indonesia.

Pasal 8.

- (1) Pimpinan - (Management) dari proyek-proyek tersebut harus pada pokoknya di pegang oleh pihak Indonesia.
- (2) Pihak asing dapat di ikut-sertakan dalam management, atau dalam bentuk lain misalnya sebagai team ahli teknis/pembantu pimpinan.
- (3) Dimana tenaga pihak asing sangat diperlukan untuk sepenuhnya turut serta di dalam pimpinan, maka izin dari Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar "Production Sharing" harus diperoleh terlebih dahulu.

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1963.
Presi den Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT, S. H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 97